

**BAB IV**

**DUKUNGAN INTERNASIONAL DALAM PERWUJUDAN**

**KEADILAN GENDER DI FINLANDIA**

**A. Kerja Sama Gerakan Perempuan di Eropa**

Sejarah bersatunya gerakan perempuan di Eropa untuk memperjuangkan keadilan sebagai tindakan kolektif dapat ditemukan pada akhir tahun 1900an. Munculnya gerakan perempuan di Eropa ini sebenarnya juga terpengaruh oleh gerakan perempuan yang ada di Amerika Serikat yang pada saat itu berfokus untuk menentang konsumsi minuman beralkohol. Demi menyuarkan hak perempuan pada saat itu, dengan berakar pusat di Inggris, mulailah menyebar gerakan yang menuntut adanya kesempatan bagi perempuan untuk dapat bersuara. Hal ini juga berdampak pada munculnya *International Woman Suffrage Association* antara tahun 1899 dan 1902 (Rubio-Marin, 2014).

Secara bersama-sama, anggota gerakan perempuan didominasi oleh perempuan terpelajar dari kelas atas yang menentang adanya sistem tirani yang diberlakukan terhadap perempuan. Pada saat itu, perempuan merasa bahwa hak-hak mereka telah direnggut dan tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan negara, hal inilah yang kemudian memunculkan adanya konfrontasi yang dikenal dengan sebutan *Woman Question* pada akhir tahun 1900an (Ballarin, Euler, Le Feuvre, & Raevaara, 1996). Para wakilnya berasal dari para perempuan terpelajar pada saat itu, yang mana ayah dan saudara laki-laki mereka setidaknya masih memberikan akses pengetahuan kepada mereka di saat yang lain tidak. Sayangnya, suara perempuan pada saat itu masih tidak didengar.

Permintaan gerakan perempuan pada saat itu masih terbatas pada hak pilih dalam negara. Masa perempuan menuntut hak pilih sering disebut sebagai feminisme gelombang pertama. Perempuan masih pula terkekang dibawah suami mereka. Tidak hanya karena adanya tuntutan gerakan perempuan, tetapi juga dikarenakan adanya penyebaran respon di Eropa mengenai revolusi industri dan perubahan di ekonomi struktur membuat munculnya perempuan-perempuan kelas atas yang menuntut hak untuk bekerja (Rubio-Marin, 2014).

Pada saat itu, terdapat pula tuntutan dari gerakan perempuan untuk pendidikan. Ide ini juga yang sedikit banyak membuat gerakan perempuan Eropa sejak tahun 1900an dan hingga tahun 2000an menuntut pula adanya hak akan pendidikan. Pada tahun 1860, gerakan perempuan di Finlandia mencantumkan bahwa hak pendidikan juga merupakan fondasi dasar dari program politik mereka, yang mana mereka tetap berpegang teguh pada pemenuhan hak pilih perempuan (Rubio-Marin, 2014).

Hak pilih perempuan menjadi hak yang diperjuangkan karena para perempuan pada saat itu merasa dengan adanya hak perempuan untuk memilih dan dipilih dapat membuat mereka memiliki akses terhadap keputusan politik dan juga dapat membuat hukum yang akan menghapuskan bentuk ketidaksetaraan. Gerakan perempuan Inggris juga gencar menyuarakan keadilan, akan tetapi mereka menggunakan kekerasan dalam aksinya, salah satunya yaitu *National Union of Women's Suffrage*. Pada akhirnya semua pihak yang ikut dengan organisasi ini ditahan (Ballarin, Euler, Le Feuvre, & Raevaara, 1996). Di negara Eropa bagian utara, gerakan perempuan Finlandia dan Norwegia hadir sebagai

gerakan yang berhasil mengimplementasikan tuntutan mereka, terbukti dengan Finlandia menjadi negara pertama di Eropa yang mempunyai hak pilih terhadap perempuan di tahun 1906. Hal ini juga dipengaruhi dengan kondisi negara yang agraris di mana mau tidak mau mereka membutuhkan perempuan untuk bekerja sama berdampingan dengan laki-laki (Rubio-Marin, 2014).

Menggambarkan akses perempuan untuk mendapatkan hak pilih bukanlah perjuangan mudah yang dilakukan oleh kaum perempuan serta organisasi-organisasi perempuan yang berkontribusi untuk memerangi marginalisasi terhadap perempuan di masing-masing negara. Faktanya, upaya perempuan untuk mendapatkan hak pilih dengan berkoordinasi dengan gerakan buruh untuk menuntut hak pilih perempuan dan hak bekerja bagi perempuan juga merupakan salah satu faktor yang menjelaskan mengapa di beberapa negara perempuan mendapatkan hak pilih yang lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya yang harus menunggu lebih lama (Rubio-Marin, 2014).

Di antara tahun 1890 dan 1930, jumlah gerakan politik nasional maupun internasional yang menuntut adanya hak pilih di beberapa negara tertentu juga semakin bertambah. Banyaknya permintaan inilah yang sedikit banyak membuat tuntutan hak pilih perempuan (*women suffrage*) kemudian dikabulkan oleh masing-masing negara. Di beberapa negara yang masih berperang bahkan perempuan turut berkontribusi dalam kemerdekaan (Sulkunen, 2007).

Lebih jauh, maraknya kemunculan gerakan perempuan di Eropa juga dipengaruhi dengan kemunculan gagasan feminisme di antara kaum perempuan. Gagasan ini sesungguhnya muncul dan kemudian menjadi subjek penting dalam

hubungan internasional ketika para feminis mempertanyakan subjek kajian hubungan internasional yang hanya berfokus pada perang, keamanan, dan rasionalitas yang identik dengan sifat maskulin (True, 2005).

Tahun 1960an dan 1970an sering dianggap sebagai munculnya gerakan feminisme gelombang kedua. Tuntutan gerakan perempuan pada gelombang ini masih berfokus pada masalah hak-hak perempuan. Barulah pada tahun 1980an dan 1990an, media memainkan peran penting. Keberhasilan gerakan perempuan bermula dari *press* (media) dan organisasi publik yang saling berhubungan (Lubis, 2006).

Skemanya adalah dengan membuat surat kabar yang berisi tentang pentingnya perempuan dalam suatu pengambilan keputusan suatu negara yang dapat mempengaruhi kebijakan negara. Surat kabar berperan sebagai penarik perhatian terbaik untuk perempuan, dan juga sebagai media propaganda. Hal ini lalu mempengaruhi perempuan untuk ikut hadir dalam pemerintahan dan menghasilkan keputusan politik yang jauh dari ketidaksetaraan. Dengan hadirnya perempuan sebagai representasi dari partai-partai politik membuat gerakan perempuan dapat menyalurkan aspirasi perempuan lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Ballarin, Euler, Le Feuvre, & Raevaara, 1996).

Seiring dengan perkembangannya, gelombang feminisme ketiga dimulai setelah perempuan mendapatkan hak politik dan ekonomi. Gerakan perempuan secara aktif melanjutkan kerja sama demi tercapainya keadilan gender. Pada saat ini bahkan semakin banyak negara-negara menyumbangkan wakil perempuannya di pemerintah, yang terbanyak di antaranya adalah negara-negara yang sedari

awal memang sudah mendapatkan hak pilih pertama kali, seperti Finlandia dan Swedia.

Salah satu pihak yang menjadi aktor utama dalam menghadapi globalisasi dan dapat mempengaruhi kebijakan negara dalam hal ini mengenai keadilan gender adalah *Transnational Advocacy Network* (TANs). Di awal tahun 1990an, *gender mainstreaming* mulai diperhatikan oleh negara-negara khususnya negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. *Transnational Advocacy Network* (TANs) kemudian menjadi krusial karena turut serta membantu terciptanya *gender mainstreaming* agar sesuai dengan *Beijing for Platform Action* yang ditetapkan pada tahun 1995 (Lang, 2009).

Gerakan perempuan berperan melalui keterlibatan dalam TANs. Kehadiran *Transnational Advocacy Network* (TANs) berperan sebagai jaringan yang melakukan advokasi untuk mempengaruhi sekaligus menekan pemerintah dalam negeri untuk dapat berkomitmen sesuai dengan kesepakatan yang berkaitan dengan keadilan gender yang sudah ditandatangani oleh negara masing-masing.

Di wilayah Eropa, terdapat lima TANs yang aktif dalam memperjuangkan keadilan gender. Jaringan transnasional perempuan Eropa ini menghasilkan diskusi publik yang menjurus terhadap pentingnya keadilan perempuan dan laki-laki. Para perempuan Eropa ini berperan sebagai aktor eksternal yang dapat mendukung strategi keadilan dengan kemampuan mereka dan dapat mempengaruhi keputusan politik untuk tetap memasukkan *gender mainstreaming* sebagai agenda politik negara masing-masing (Lang, 2009). Berikut ini adalah kelima TANs di Eropa.

Tabel 4.1. *Transnational Advocacy Networks* (TANs) di Eropa

	Founded	Mission	Members	Funding	Projects	Strategies
EWL, European Women's Lobby	1990	Fostering coordination of women's NGOs on the EU level	Delegates from 4,000 women's NGOs on national and EU level	Ca. 80% EU, 20% membership fees and other resources	Women's empowerment and gender equality—no feminist rhetoric	Monitoring, networking and institutional lobbying
KARAT, Coalition of CEE/CIS women's NGO's	1995	Network of women in Eastern and Central Europe and the Commonwealth of Independent States	Warsaw based association with 65 NGOs and individual members	International and national public authorities and NGOs	Promoting gender equality in CEE/CIS states	Monitoring the implementation of international agreements, lobbying, projects
WAVE, Women Against Violence Europe	1994	Network of women's NGOs combating violence against women/children	4,000 women's NGOs across Europe	International and national public authorities and private donations	Strengthening human rights of women and children, feminist analysis	Information exchange, influence policies, promote feminist analysis
WECF, Women in Europe for our Common Future	1992	Stimulates cooperation between women in NGOs in environment, health, sustainable development	Network of 80 women environment organizations in 33 European and Central Asian countries	Foundations, private donors and public/institutional sponsors	Gender sensitive environmental policy and gender impact assessments - no feminist rhetoric	Institutional lobbying, networking
WIDE, Network Women in Development Europe	1985	Network of development NGOs, monitors and influences global economic and development policy and practice	National platforms in 9 EU member states, individual members and associations	National governments, foundations, and EU; membership fees of platforms	Promoting gender equality through feminist analysis	Information exchange, networking

Sumber: European Women's TANs and Gender Mainstreaming 2009

## **A. Keputusan Internasional sebagai Alat Gerakan Perempuan untuk Mempengaruhi Pemerintah Finlandia**

Dalam menjalankan strategi untuk mempromosikan keadilan gender, gerakan perempuan Finlandia juga berkomitmen lewat keterlibatan negaranya dalam keputusan-keputusan internasional. Keputusan internasional ini mempengaruhi negara-negara yang terkait untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani. Finlandia termasuk negara yang aktif terlibat dalam kerja sama yang melibatkan negara-negara di dunia ini. Oleh karena itu, gerakan perempuan di Finlandia turut aktif menjadikan keputusan internasional ini sebagai cara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pertama adalah perjanjian UN *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang ditetapkan oleh sidang umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi ini merupakan perjanjian penting yang mengikat pemerintah antar negara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Finlandia meratifikasi UN CEDAW pada tahun 1986 dan tahun 2002 dan hingga saat ini sudah diratifikasi oleh 170 negara di dunia. Implementasi dari konvensi ini dimonitori oleh UN *Committee on the Elimination of Discrimination* dengan tujuan agar setiap negara yang terikat pada konvensi berkewajiban untuk berkomitmen penuh terhadap isi konvensi (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2003).

Sebagai contoh, komitmen Finlandia terhadap CEDAW di antaranya adalah dengan menekan pemerintah untuk kemudian mengeluarkan *National Action Program against VAW* (*Violence against Women*) yang berisi kewajiban

pemerintah untuk mengambil tindakan melawan segala bentuk kekerasan dengan memperkuat hukum dan melindungi korban dan juga menginspirasi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan *gender mainstreaming*.

Kedua adalah *Declaration and Platform for Action* yang bertujuan untuk meningkatkan status perempuan disepakati pada UN's *Fourth World Conference on Women* di Beijing pada tahun 1995. Perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama *Beijing Platform for Action* ini berisi tujuan dan langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh para anggota PBB untuk memerangi 12 hal yang menjadi fokus dari perjanjian (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2003).

Kedua belas fokus area tersebut yaitu: a) perempuan dan kemiskinan; b) perempuan dan pendidikan; c) perempuan dan kesehatan; d) kekerasan terhadap perempuan; e) perempuan dan daerah konflik; f) perempuan dan ekonomi; g) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; g) mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; h) hak asasi manusia dan perempuan; i) perempuan dan media; j) perempuan dan lingkungan; dan k) diskriminasi anak perempuan (Candraningrum, 2015).

Ketiga, Finlandia kembali menekankan pentingnya implementasi terhadap UN *Beijing Platform for Action* tahun 1995 pada *Twenty Third United Nations General Assembly Special Session "Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for 21<sup>st</sup> Century"* pada bulan Juni tahun 2000. Komitmen juga semakin diperluas terhadap hal-hal baru semisal tentang perdagangan anak dan perempuan serta efek HIV/AIDS pada perempuan (UNECE, Country Report by Finland, 2004).

Keempat, Finlandia juga berkomitmen terhadap *United Nations Millennium Declaration* yang ditetapkan pada September 2000 ketika *55<sup>th</sup> session* dari *General Assembly* dilaksanakan. Deklarasi ini merupakan komitmen internasional untuk mewujudkan perdamaian, pembangunan, dan perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia lewat *Millennium Development Goals* (MDGs). Salah satu dari 8 tujuan pembangunan adalah dengan mempromosikan keadilan gender dan meningkatkan status perempuan (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2003).

Dari penjabaran di atas, keterlibatan Finlandia dalam keputusan-keputusan internasional sedikit banyak mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil gender dalam negara. Komitmen Finlandia terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut dibuktikan dengan penerapan kebijakan dalam negara.

## **B. Statistik Perkembangan Keadilan Gender di Finlandia**

Pembentukan gerakan perempuan dan juga dukungan internasional membantu Finlandia untuk dapat mewujudkan keadilan gender di negaranya. Pada tahun 1906, perempuan Finlandia merupakan perempuan pertama di Eropa yang memperoleh hak pilih dan hak memilih. Pada pemilihan parlemen pertama tahun 1907, perempuan mendapatkan bagian 10% dan ini merupakan yang tertinggi di dunia.

Salah satu reformasi kebijakan perempuan yang penting pada tahun 1990an adalah mengenai dasar kuota yang diperkenalkan bersamaan dengan

amandemen *Finnish Act on Equality between Women and Men* pada tahun 1995. Kuota gender lalu mulai diberlakukan diseluruh aspek pemerintahan.

Selain itu pula, perempuan Finlandia sudah aktif dalam kehidupan bekerja sejak lama. Dalam perkembangannya, partisipasi perempuan dalam bekerja juga semakin meningkat. Dalam program keadilan gendernya, Pemerintah Finlandia mendeklarasikan negaranya untuk mempromosikan keadilan lewat *mainstreaming* (pengarusutamaan). Tujuannya adalah untuk menciptakan jalan administratif dan politik di mana prinsip untuk mempromosikan keadilan juga berujung pada aksi sebenarnya di dunia nyata (Kuusi, Vänskä, & Kurki, 2001).

Model keadilan negara-negara Nordik secara umum diterima di Finlandia. Hal ini ditunjukkan dari mulainya dibuat laporan barometer keadilan oleh pemerintah sejak tahun 1998. Laporan ini berlaku diseluruh aspek keadilan, seperti keadilan hubungan sesama manusia. Seiring dengan perkembangannya, hasil dari laporan yang disampaikan oleh pemerintah ini menghasilkan sebuah paradoks di kalangan masyarakat Finlandia, paradoks tersebut adalah keyakinan bahwa Finlandia sudah mencapai keadilan gender. Keberhasilan keadilan gender di Finlandia dapat dilihat dari beberapa statistik di beberapa bidang berikut ini:

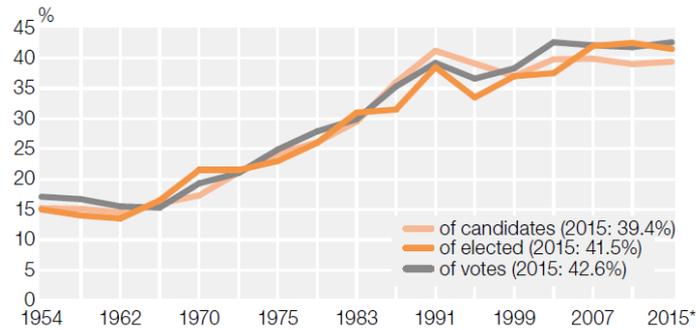
#### 1. Bidang Politik

- Peningkatan Partisipasi Pembuatan Keputusan

Finlandia merupakan negara Eropa pertama yang memperoleh hak pilih dan hak memilih. Sejak itu, partisipasi dan kesempatan bagi perempuan untuk duduk di parlemen juga semakin meningkat. Ada upaya dari gerakan perempuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan

di negaranya. Peningkatan partisipasi perempuan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Finlandia



Sumber: Justice/Elections, Statistics Finland 2016

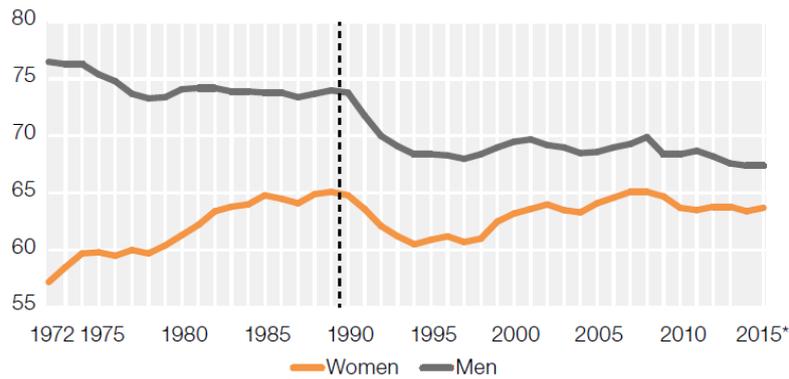
Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan Finlandia dari tahun ke tahun mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat memilih dan dipilih sebagai anggota parlemen. Sejak dikeluarkannya kebijakan kuota minimal 40%, partisipasi perempuan di parlemen selalu melebihi presentase tersebut.

## 2. Bidang Ekonomi

### - Partisipasi di Tempat Kerja

Di tempat kerja, partisipasi perempuan untuk dapat memperoleh pekerjaan juga semakin meningkat di Finlandia. Selain itu, pendapatan perempuan yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan laki-laki juga sudah menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masalah kontrak kerja, gaji antara perempuan dan laki-laki, serta sektor kerja sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah lewat kebijakan-kebiakan yang dikeluarkan. Peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dapat dilihat dari tabel partisipasi tenaga kerja dari tahun 1972 hingga tahun 2015 berikut ini.

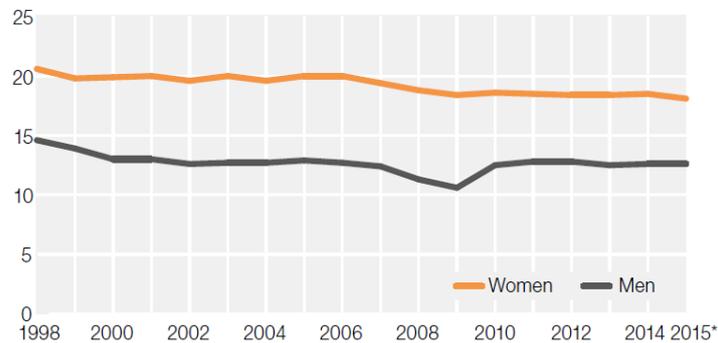
Tabel 4.3. Partisipasi Tenaga Kerja di Finlandia (Usia 15 – 74 Tahun)



Sumber: Statistics Finland, Women and Men in Finland 2016

Selain partisipasi tenaga kerja perempuan yang meningkat dan setara dengan laki-laki, pemberlakuan jangka waktu tetap pekerjaan (*fixed-term employment*) yang diberlakukan terhadap perempuan juga semakin berkurang, walaupun masih tetap lebih tinggi dari laki-laki. Berikut tabel proporsi jangka waktu tetap pekerjaan dari tahun 1998 hingga tahun 2015.

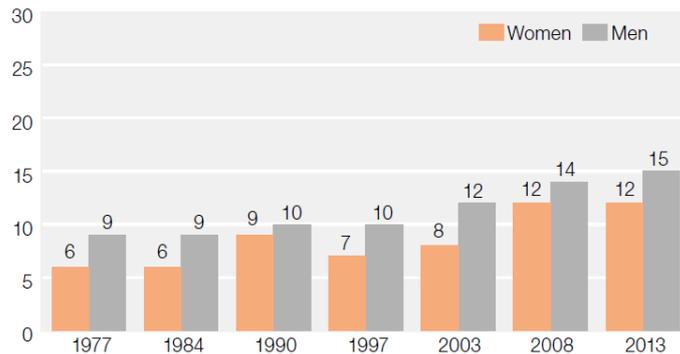
Tabel 4.4. Proporsi Jangka Waktu Tetap Pekerjaan (*Fixed-Term Employment*) di Finlandia (Usia 15 – 74 Tahun)



Sumber: Statistics Finland, Women and Men in Finland 2016

Kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh kemajuan dalam bekerja juga semakin meningkat, walau masih lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Kesempatan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

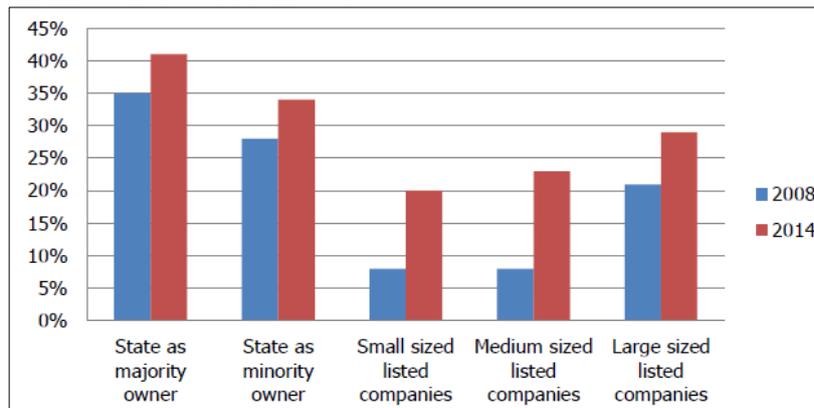
Tabel 4.5. Kesempatan Memperoleh Kemajuan di Tempat Kerja di Finlandia



Sumber: Statistics Finland, Women and Men in Finland 2016

Selain kedua tabel di atas, kemajuan dalam tempat kerja dapat dilihat dari partisipasi perempuan yang terlibat dan menduduki posisi penting di tempat kerja berikut ini.

Tabel 4.6 Perbandingan Presentase Perempuan Menduduki Posisi Penting di Perusahaan Tahun 2008 dan 2014



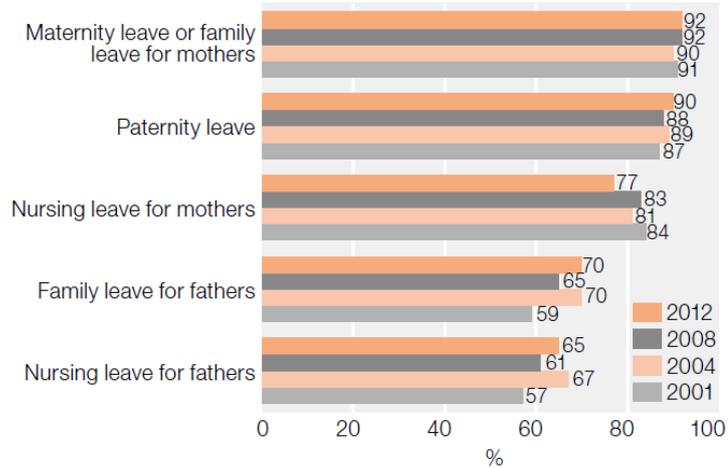
Sumber: Finnish Chamber of Commerce and Statistics Finland

- Perlakuan Terhadap Gender (*Gender Attitudes*) di Tempat Kerja

Keadilan gender yang dicapai Finlandia tidak lepas dari bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan. Pendapat ini secara bertahap terus berkembang di Finlandia karena tumbuhnya kesadaran dari masyarakat akan manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan tersebut.

Berikut ini adalah tabel reaksi dari tempat kerja terhadap perempuan yang cuti melahirkan, *paternity leave*, dan cuti merawat anak oleh kedua orang tua.

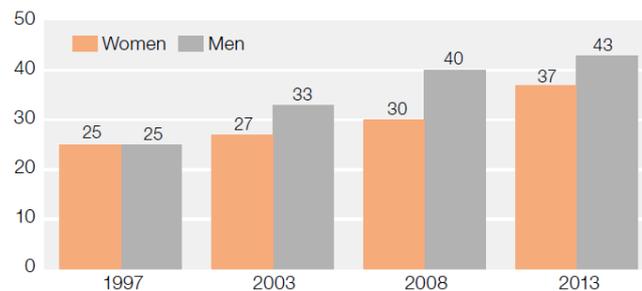
Tabel 4.7. Reaksi Tempat Kerja Menjawab “Ya” Terhadap Cuti di Finlandia



Sumber: Gender Equality Barometer 2012, Ministry of Social Affairs and Health

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan persepsi dari para rekan sesama tempat kerja yang mengambil cuti. Selain itu, keadilan yang terjadi di tempat kerja lainnya adalah dari tabel tanggapan tenaga kerja yang menyatakan bahwa keadilan gender sudah dicapai dengan baik berikut ini.

Tabel 4.8. Reaksi Tenaga Kerja Menjawab “Berhasil Tercapai” Terhadap Keadilan Gender di Tempat Kerja di Finlandia

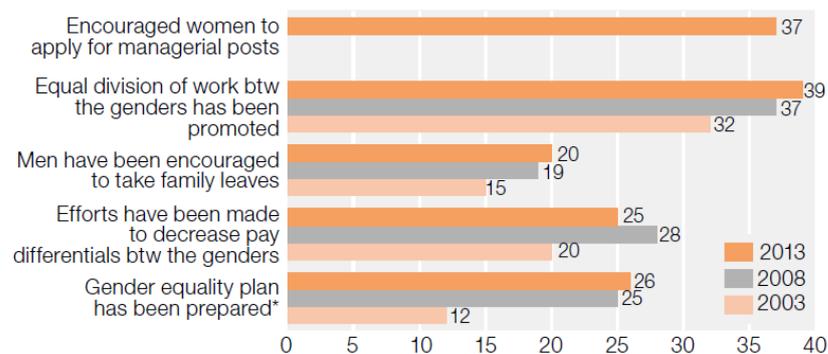


Sumber: Labour Market/Quality of work life surveys 1997-2013, Statistics Finland

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan perempuan Finlandia sudah merasa keadilan tercapai di tempat kerjanya. Ketika kebijakan keadilan gender

sudah semakin meningkat diterapkan, keadilan juga semakin terasa secara nyata, terutama di tempat kerja. Tabel berikut ini juga menunjukkan rekonsiliasi antara keluarga dan tempat kerja yang mulai diberlakukan.

Tabel 4.9. Reaksi Tempat Kerja Menjawab “Ya” Terhadap Keadilan Gender di Tempat Kerja di Finlandia



Sumber: Labour Market/Quality of work life surveis 2003-2013, Statistics Finland

Dari tabel di atas, peningkatan yang terjadi di antaranya adalah mengenai laki-laki yang diperbolehkan dan diminta untuk mengambil cuti merawat anak, peningkatan perempuan yang mulai menempati posisi atas, penghapusan pemberian gaji berdasarkan gender, dan juga ketentuan tempat kerja untuk mulai mempersiapkan rencana keadilan gender.

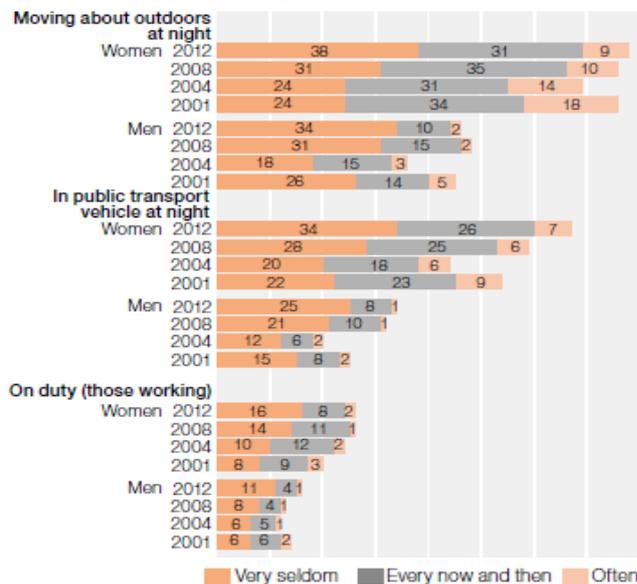
### 3. Bidang Sosial

#### - Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang masih menjadi beban bagi pemerintah Finlandia. Hal ini dikarenakan masih maraknya kekerasan terjadi, khususnya terhadap perempuan. Berdasarkan tabel mengenai ketakutan untuk menjadi korban dari kekerasan, terjadi peningkatan

dari pandangan perempuan untuk berani dan tidak takut terhadap hal tersebut, berikut ini adalah tabelnya.

Tabel 4.10. Ketakutan Menjadi Korban Kekerasan di Finlandia



Sumber: The Gender Barometer 2012, Ministry of Social Affairs and Health

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2001 hingga tahun 2012 secara berangsur-angsur perempuan menjadi lebih berani dan tidak takut untuk menjadi korban kekerasan, hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kebijakan yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan sehingga sedikit banyak perempuan merasa aman baik itu ketika berpergian malam, ketika sedang berada di transportasi umum, maupun ketika sedang bekerja.

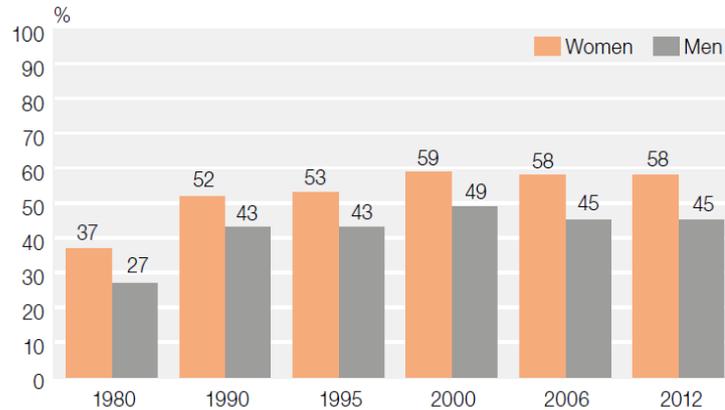
#### 4. Bidang Pendidikan

##### - Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Di bidang pendidikan, usaha sudah dilakukan oleh pemerintah agar perempuan menerima kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kesempatan

yang sama tersebut dapat dilihat dari tabel partisipasi perempuan dan laki-laki di pendidikan dengan populasi usia 18 – 64 tahun berikut.

Tabel 4.11. Partisipasi Penduduk Finlandia dalam Menempuh Pendidikan (Populasi Usia 18 – 64 Tahun)



Sumber: Statistics Finland, Women and Men in Finland 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 1980 partisipasi perempuan untuk dapat terlibat dalam pendidikan masih menunjukkan angka 37%, namun presentase ini meningkat dari tahun ke tahun yaitu di tahun 1990 menunjukkan angka 52%, tahun 1995 menghasilkan 53%, tahun 2000 menghasilkan 59%, tahun 2006 menghasilkan 58%, dan tahun 2012 juga menghasilkan 58%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kebijakan yang mengatur tentang pendidikan sehingga partisipasi tersebut meningkat.

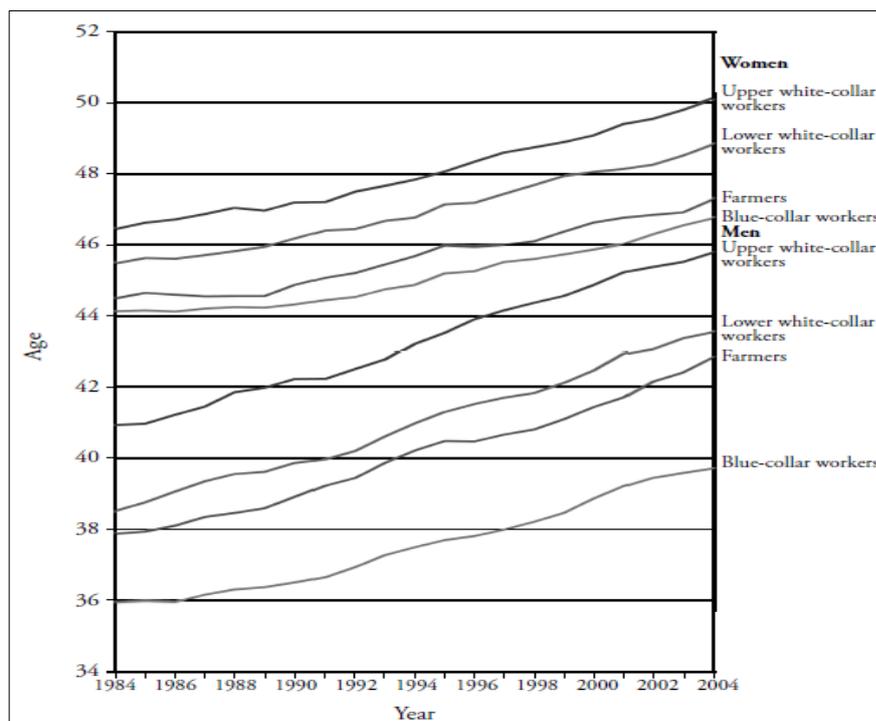
## 5. Bidang Kesehatan

### - Tingkat Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Finlandia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki dan

meningkatkan akses kesehatan warga negaranya, baik itu perempuan dan laki-laki. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat usia harapan hidup di antara para pekerja dengan keterampilan tinggi (*white-collar workers*), para pekerja dengan keterampilan rendah (*blue-collar workers*), petani, dan para pekerja yang tidak memiliki keterampilan di Finlandia.

Tabel 4.12. Tingkat Usia Harapan Hidup di Finlandia



Sumber: Finnish Experiences in Tackling Health Inequalities 2012

Secara berangsur-angsur Finlandia memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan gender dan melakukan peningkatan terhadapnya. Ketidakadilan gender yang dialami di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan menjadi perhatian gerakan perempuan untuk secara terus menerus melanjutkan advokasi demi tercapainya keadilan gender di Finlandia. Keberhasilan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan keadilan gender di bidang-bidang ini

membuktikan bahwa pemerintah menyadari bahwa tuntutan-tuntutan gerakan perempuan tersebut merupakan fokus-fokus yang juga menjadi perhatian negara.

Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah dalam menerima tuntutan-tuntutan gerakan perempuan dan kemudian memprosesnya lewat kebijakan untuk mewujudkan Finlandia sebagai negara yang adil gender. Hal ini juga ditambah dengan komitmen Finlandia sebagai negara yang sejahtera (*welfare state*) lewat keputusan-keputusan internasional yang ditandatangani oleh pemerintahnya. Selain keseriusan dari pemerintahnya, juga terdapat keinginan dan kesadaran dari masyarakatnya akan pentingnya suatu negara untuk mewujudkan keadilan antara perempuan dan laki-laki di negaranya.